

PELAKSANAAN ADMINISTRASI SEKOLAH UNGGUL DI SMP NEGERI 7 KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Sri Setyawati

Kepala SMP Negeri 2 Kuantan Mudik
setyawatisri381@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan administrasi sekolah unggul yang meliputi bagian administrasi dan organisasi kurikulum dan pengajaran, personalia sekolah, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, layanan khusus pendidikan, kesekretariatan pendidikan dan hubungan dengan masyarakat. Penelitian ini diharapkan berguna bagi kepala sekolah dan personil sekolah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi dalam menyelenggarakan pendidikan berwawasan keunggulan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitik. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi lainnya di SMP Negeri 7 Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Data tentang pelaksanaan administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan berwawasan menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan teknik naratif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan kurikulum dan pengajaran cukup memadai dan berpedoman kepada kurikulum nasional diperkaya dengan muatan lokal, personalia pendidik belum memadai, penerimaan siswa baru belum melalui tes penyaringan yang ketat, sarana prasarana ruangan secara umum cukup memadai, dana operasional sekolah diperoleh dari masyarakat, siswa atau orangtua siswa dan dana rutin, layanan kesehatan yang melalui UKS dan BK. Administrasi keakademikan telah dapat dilaksanakan dengan baik, mekanisme hubungan yang dilakukan sekolah dengan masyarakat dilaksanakan melalui pemanggilan orangtua ke sekolah dan belum menggunakan media cetak dan elektronika.

Kata kunci : Administrasi, SMP.

PENDAHULUAN

Menindak lanjuti kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan, berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Kuantan Singingi No. KPPS/91/421/V/2003 tanggal 17 Mei 2003, SMPN Teluk Kuantan Singingi

ditunjuk untuk melaksanakan pendidikan berwawasan keunggulan, dimana sekolah unggul yang dimaksud adalah sekolah yang memiliki keunggulan tidak saja berorientasi pada fasilitas atau sarana dan prasarana yang unggul atau hanya berorientasi pada keunggulan pencapaian nilai akademik yang tinggi saja. Akan tetapi keunggulan harus mencakup keseluruhan elemen unsur yang meliputi administrasi organisasi kurikulum dan pengajaran, personalia sekolah, kesiswaan, sarana dan prasarana, keuangan, layanan khusus, keakademikan dan hubungan dengan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan sekolah berwawasan keunggulan, pengelolaan administrasi secara baik dan benar akan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan sekolah unggul tersebut. Kunci utama pelaksanaan sekolah unggul antara lain adalah dilaksanakannya pengadministrasian sekolah secara efektif dan efisien yang mencakup keseluruhan unsur atau elemen berbagai subsistem yang ada didalam kesatuan sistem sekolah unggul tersebut.

Seringkali masih ditemui di lapangan, administrasi berkenaan dengan rekrutmen siswa sebagai input pada sekolah berwawasan keunggulan belum sepenuhnya berorientasi pada berbagai aspek secara komprehensif akan tetapi lebih mengacu kepada aspek kognitif dan tingginya prestasi atau nilai akademik yang dicapainya. Akibatnya, output sekolah yang berwawasan sekolah unggul tidak sebagaimana yang diharapkan.

Tentu saja dalam pelaksanaan administrasi sekolah berwawasan keunggulan akan ditemui banyak kendala yang dapat menjadi tantangan untuk menjawabnya dan terutama dalam upaya pelaksanaan administrasi sekolah unggul dengan lebih baik dan memadai.

Berdasarkan berbagai hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui secara lebih mendalam berkenaan dengan pelaksanaan administrasi sekolah dan kendala serta cara mengatasinya yang akan dilaksanakan pada SMPN 7 Kuantan Tengan Kabupaten Kuantan Singingi.

ACUAN TEORITIK

A. Pengertian Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan didefinisikan beragam oleh para ahli pendidikan antara lain Terry (dalam Kamars) merumuskan definisi manajemen yaitu, manajemen adalah sebuah kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan.

Syaiful Sagala menyatakan bahwa administrasi pendidikan pada intinya adalah segenap proses pengarahan dan

pengintegrasian segala sesuatu atau potensi dalam satu aktifitas kelembagaan, baik personal, spiritual, dan material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan.

Berkenaan dengan administrasi pendidikan, Soetopo dan Soemanto mengutip pendapat S. Monroe mengemukakan definisi dengan terjemahan bebasnya ialah, administrasi pendidikan adalah pengarahan, pengawasan dan manajemen semua hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sekolah. Ruang lingkup administrasi pendidikan tersebut antara lain: administrasi dan organisasi

kurikulum, ketenagaan pendidikan, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, layanan khusus pendidikan, kesekretariatan pendidikan dan hubungan dengan masyarakat.

B. Sekolah Unggul

1. Tujuan Sekolah Unggul

Acuan dasar dan tujuan umum sekolah unggul adalah tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam GBHN dan UUSPN No. 20 Tahun 2003, yaitu agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Dasar Hukum Sekolah Unggul

Dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 disebutkan beberapa dasar hukum bagi terselenggaranya sekolah berwawasan keunggulan antara lain:

1. Pasal 5 ayat 4.
2. Pasal 12 ayat 1 butir b.
3. Pasal 12 ayat 1 butir f.

3. Konsep Sekolah Unggul

Depdikbud RI (1995) menjelaskan beberapa karakteristik sekolah berwawasan keunggulan sebagai berikut:

1. Masukan (input) berupa siswa siswi yang disaring melalui seleksi secara ketat, dengan memakai indikator-indikator tertentu.
2. Sarana dan prasarana yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa.

3. Lingkungan belajar yang menunjang baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial psikologis.
4. Guru dan tenaga kependidikan yang berpotensi.
5. Menggunakan kurikulum nasional yang baku, dilakukan pengayaan secara maksimal yang sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik.
6. Rentang waktu belajar di sekolah disediakan lebih lama dari sekolah lain.
7. Pembinaan kemampuan kepemimpinan yang menyatu dalam seluruh sistem.
8. Sekolah unggul harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ada meski diberi keleluasan sesuai dengan misi dan tujuannya.
9. Sekolah unggul diproyeksikan untuk menjadi pusat keunggulan bagi sekolah-sekolah sekitar.

C. Administrasi Sekolah Unggul

Dalam pelaksanaan sekolah berwawasan keunggulan, diharapkan dapat diterapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) sehingga fungsi-fungsi manajemen dapat diaplikasikan secara optimal. Hal ini dikarenakan manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang ditandai adanya kewenangan pengambilan keputusan yang luas ditingkat sekolah.

Malen, dkk (dalam Abu Duhou 2002) menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah secara konseptual dapat digambarkan sebagai suatu perubahan formal struktur penyelenggaraan, sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada

redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana paling penting yang dengannya peningkatan dapat didorong dan ditopang. Berdasarkan hal tersebut maka manajemen memegang peranan penting terhadap keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya.

Administrasi pendidikan sebagai suatu sistem yang terkait dengan suatu institusi pendidikan yang didalamnya ada serangkaian kegiatan atau proses dan kerjasama sejumlah orang dengan mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantung satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan secara optimal.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2005 s/d bulan Desember 2005 di SMP Negeri 7 Kuantan Tengah yang terletak di Jl. Proklamasi Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Unit Analisis

1. Bagian administrasi kurikulum dan pengajaran yang mencakup ketersediaan kurikulum nasional dan lokal, keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal serta prosentase daya serap/ketuntasan kurikulum nasional dan lokal.
2. Bagian administrasi ketenagaan (personalia sekolah) mencakup kinerja Kepala Sekolah, prosentase guru dan tenaga administrasi berkualitas, kesesuaian antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampunya atau tenaga administrasi dengan pekerjaannya dan rasio antara guru dengan siswa.
3. Bagian administrasi kesiswaan (peserta didik) mencakup sistem penerimaan siswa, angka pendaftaran siswa, dan angka putus sekolah.
4. Bagian administrasi sarana dan prasarana mencakup luas lahan, kondisi/jumlah bangunan, peralatan/lab/media, buku teks, dan sarana lain.

5. Bagian administrasi pembiayaan (keuangan) mencakup anggaran sekolah dari pemerintah, anggaran biaya dari swadaya masyarakat dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan.
6. Bagian administrasi layanan khusus mencakup pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa, rasio antara guru pembimbing dengan jumlah siswa.
7. Bagian administrasi organisasi dan manajemen mencakup tingkat kehadiran guru, kehadiran tenaga administrasi, bagan atau struktur organisasi.
8. Bagian administrasi peran serta masyarakat mencakup dukungan BP3, Komite sekolah, peran serta masyarakat, perhatian orangtua dan peran serta tokoh masyarakat.

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif, menggambarkan fakta-fakta sesuai dengan keadaan pelaksanaan administrasi sekolah yang mencakup administrasi kurikulum dan pengajaran, administrasi kurikulum dan pengajaran, administrasi kesiswaan, administrasi sarana dan prasarana, administrasi pembiayaan (keuangan), administrasi layanan, administrasi organisasi dan manajemen, dan administrasi peran serta masyarakat.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

E. Tehnik Analisa Data

1. Redukasi data yang merupakan kegiatan meringkas ulang semua catatan lapangan dengan

memperhatikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data yang merupakan proses pemberian sejumlah informasi yang telah disusun yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.
3. Menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Administrasi Kurikulum dan Pengajaran.

Secara umum dalam masalah yang berkenaan dengan relevansi, efektifitas, efisiensi, dan kontinuitas kurikulum yang dilaksanakan dalam

melaksanakan sekolah unggul dapat diwujudkan. Hal ini dikarenakan kurikulum yang dipakai di sekolah tersebut tetap mengacu kepada kurikulum nasional.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Standar Minimal Kurikulum dan Pengajaran

| No | Komponen | Indikator | Ketercapaian Minimal |
|----|--------------------------|--|----------------------|
| 1. | Kurikulum dan pengajaran | 1 Ketersediaan kurikulum nasional | Ada |
| | | 2 Ketersediaan kurikulum lokal | Ada |
| | | 3 Keterlaksanaan kurikulum nasional | Sesuai |
| | | 4 Keterlaksanaan kurikulum lokal | Sesuai |
| | | 5 Prosentase daya serap kurikulum nasional | 75% lebih |
| | | 6 Prosentase daya serap kurikulum lokal | 75% lebih |

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa telah ada atau telah tersedia kurikulum nasional. Kurikulum dan pembelajaran standar pelayanan minimal telah tercapai. Untuk proses pembelajaran, daya serap telah memenuhi standar pelayanan minimal dengan ketuntasan materi dan daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran diatas 75%. Daya serap ini mencakup materi yang disajikan baik dalam kurikulum nasional maupun kurikulum lokal.

2. Administrasi Ketenagaan (Personalia Sekolah).

Dalam pelaksanaan sekolah unggul diperlukan tenaga guru yang unggul pula dan dapat secara profesional menjalankan tugasnya. Peningkatan tersebut tidak hanya pada kuantitas tetapi juga kualitas.

Berdasarkan kondisi guru dan pembagian tugas mata pelajaran, masih ada guru yang mengajarkan beberapa mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya tidak berkaitan sama sekali dan bahkan tidak sesuai dengan latar

belakang pendidikan guru yang bersangkutan.

Sebagian besar guru yang berlatar belakang di bawah S1 dan mata pelajaran yang dipegangnya kurang relevan dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini ditunjukkan dengan 50% lebih tenaga guru berkualitas D3, D2 dan D1. Latar belakang dan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seorang guru pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profesionalisme dalam mengajar. Guru yang memenuhi persyaratan standar

minimal sebanyak 16 orang dari 29 orang guru. Dengan demikian, prosentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebanyak 55,2%.

Apabila dilihat dari rasio ideal kebutuhan guru dan siswa yakni 1 : 28, dengan jumlah guru sebanyak 29 dengan jumlah siswa sebanyak 901. Dengan demikian, perbandingan jumlah guru dan siswa adalah 1 : 33 orang siswa. Oleh karena itu, secara kuantitas jumlah guru masih memerlukan tambahan.

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Standar Minimal Ketenagaan

| No | Komponen | Indikator | Ketercapaian Minimal |
|----|------------|-------------------------------|----------------------|
| 2. | Ketenagaan | 1 Kinerja kapala sekolah | Baik |
| | | 2 Prosentase guru berkualitas | 60% |
| | | 3 Kualifikasi guru keahlian | 60% |
| | | 4 Rasio guru dan siswa | 1 : 28 |

Secara umum dapat dikatakan bahwa prosentase guru berkualifikasi dan kualifikasi guru berkahlian belum memadai karena dari 60% standar pelayanan minimal sebagaimana yang telah ditetapkan belum tercapai.

Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya tenaga

3. Administrasi Kesiswaan (Peserta Didik).

sebagai pelaksana pendidikan akan menyebabkan rendah atau buruknya pelayanan yang diberikan kepada siswa khususnya dan umumnya pihak lain yang terkait dan pada akhirnya akan bermuara pada terhambatnya pencapaian tujuan sekolah itu sendiri.

Tabel 3. Jumlah Siswa SMP Negeri 7 Kuantan Tengah

| No | Tahun Ajaran | Jumlah |
|---------------|--------------|------------|
| 1 | 2002 – 2003 | 203 |
| 2 | 2003 – 2004 | 216 |
| 3 | 2004 – 2005 | 227 |
| 4 | 2005 – 2006 | 255 |
| Jumlah | | 901 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa jumlah penerimaan siswa baru senantiasa bertambah atau meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan tersebut setidaknya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator ketercapaian standar pelayanan minimal.

Secara umum di sekolah ini belum ditemui kendala yang berat berkenaan dengan kehadiran siswa, peraturan dan disiplin, aktivitas inti, ekstrakurikuler dan mutasi siswa. Hal ini menunjukkan bahwa telah adanya kesadaran yang cukup memadai dari seluruh warga sekolah dalam menaati peraturan dan disiplin. Berkenaan

dengan mutasi siswa, belum ditemui pindah ke sekolah lain dalam kurun adanya kasus siswa yang meminta waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 4. Indikator Keberhasilan Standar Minimal Kesiswaan

| No | Komponen | Indikator | Ketercapaian Minimal |
|----|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 3. | Peserta didik (Kesiswaan) | 1 Angka partisipasi kasar (APK) | Meningkat |
| | | 2 Angka partisipasi murni (APM) | Meningkat |
| | | 3 Angka pendaftaran siswa | Meningkat |
| | | 4 Angka putus sekolah | Menurun |
| | | 5 Angka mengulang | Menurun |
| | | 6 Kelangsungan belajar siswa | Meningkat |
| | | 7 Prosentase kelulusan | 90% |

Dari tabel atas dapat dikatakan bahwa secara umum administrasi kesiswaan telah cukup memadai.

4. Administrasi Sarana Prasarana.

Kondisi sarana dan prasarana ruangan secara umum kondisi dan jumlah ruangnya telah dianggap cukup memadai dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sekolah ini memiliki 39 ruangan untuk menunjang proses belajar mengajar, 9 ruangan lengkap dengan perabotnya, 8 ruangan MCK untuk memenuhi kebutuhan siswa

dan 2 ruangan untuk guru, 1 buah laboratorium komputer, ruang tamu dan ruangan bimbingan konseling dan 1 buah gudang. Di sekolah ini juga terdapat satu buah ruang perpustakaan yang memiliki sekitar 2431 buah buku dengan berbagai klasifikasi dan satu ruangan aula.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa ditinjau dari aspek jumlah ruangan maka sekolah ini sudah layak menyelenggarakan sekolah unggul.

Tabel 5. Indikator Keberhasilan Standar Minimal Sarana dan Prasarana

| No | Komponen | Indikator | Ketercapaian Minimal |
|----|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 4. | Sarana dan Prasarana | 1 Lahan | Cukup |
| | | 2 Bangunan | Lengkap |
| | | 3 Perabot | Lengkap |
| | | 4 Peralatan/lab/media | Lengkap |
| | | 5 Rasio buku teks dengan siswa | 1 : 02 |
| | | 6 Sarana olahraga | Lengkap |
| | | 7 Infrastruktur | Lengkap |

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan secara umum administrasi sarana dan prasarana telah cukup memadai, tetapi tetap perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan umumnya dan khususnya

sarana pembelajaran untuk menunjang pencapaian sekolah unggul.

5. Administrasi Pembiayaan (Keuangan).

Hal yang sangat penting dalam masalah keuangan adalah adanya

transparansi dalam penggunaan keuangan kepada berbagai pihak melalui mekanisme yang tepat dan benar. Transparansi dan pelaporan keuangan juga berpengaruh terhadap kredibilitas sekolah dihadapan para donatur maupun masyarakat luas. Pelaporan keuangan di sekolah ini

dilakukan tiap bulan, tiga bulan sekali dan secara umum setiap akhir semester.

Alokasi dana atau pembiayaan dibebankan kepada masyarakat atau orangtua ditentukan berdasarkan persetujuan pemerintah daerah atas usulan dari kepala sekolah bersama komite sekolah atau BP3.

Tabel 6. Indikator Keberhasilan Standar Minimal Pembiayaan

| No | Komponen | Indikator | Ketercapaian Minimal |
|----|------------|--|----------------------|
| 5. | Pembiayaan | 1 Lahan | Cukup |
| | | 2 Bangunan | Lengkap |
| | | 3 Komponen yang dibiayai: - Kegiatan tehnis edukatif untuk PBM. - Operasionalisasi ruang belajar dan kegiatan ekstrakurikuler. - Perawatan sarana dan prasarana. - Kesejahteraan guru. - Langgan daya dan jasa. | Seluruhnya |

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa sekolah memperoleh (ada) bantuan pembiayaan dari anggaran pemerintah dan bantuan masyarakat dalam hal ini khususnya dari siswa atau orangtua siswa dan lainnya yang bersifat tidak meningkat.

6. Administrasi Layanan Khusus.

Secara umum kondisi sekolah yang berkenaan dengan layanan khusus kesehatan dalam hal ini UKS dapat dikatakan sudah berfungsi secara memadai. Sedangkan yang berkenaan dengan layanan khusus bimbingan dan konseling secara umum dapat dikatakan bahwa pelayanan konseling yang diberikan kepada siswa belum memadai terutama pelayanan remedial dan pengayaan.

Masalah siswa yang cukup berpengaruh dalam proses belajar mengajar dan banyak dialami siswa antara lain adalah masalah fisik. Oleh karena itu, peranan UKS sangat

diperlukan dalam membantu mengatasi masalah fisik siswa.

Layanan khusus terutama bimbingan dan konseling lebih optimal dalam melaksanakan layanan kepada siswa. Selain itu perlu juga dilakukan penambahan tenaga guru pembimbing sehingga rasio antara guru pembimbing dan siswa yakni 1 : 150 akan terpenuhi.

Banyak siswa yang menyatakan belum menguasai materi yang disampaikan guru sehingga ia memerlukan program pengayaan, sebaliknya untuk siswa yang cerdas dan memiliki kemampuan yang unggul dalam belajar sering kali mengalami masalah dengan rasa bosan sehingga baginya diperlukan adanya suatu program pengayaan.

7. Administrasi Organisasi Dan Manajemen.

Susunan organisasi telah memiliki struktur organisasi yang cukup memadai. Struktur organisasi tersebut

juga dilengkapi dengan ada susunan personalia, uraian tugas dan mekanisme kerja.

Berkenaan dengan manajemen sekolah, sekolah ini menerapkan manajemen mutu berbasis sekolah dimana kepala sekolah bersama dewan guru dan unsur terkait lainnya secara mandiri bertanggungjawab melaksanakan program sekolah.

Peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah tidak hanya terbatas pada penyediaan dana akan tetapi juga dalam perencanaan dan

pelaksanaan program melalui mekanisme yang ada mencakup pemantauan dan pengawasan.

Berkenaan dengan tertib administrasi, sekolah selalu mengagendakan surat-surat yang masuk dan keluar. Untuk manajemen peningkatan mutu tenaga kependidikan, guru sering kali dikirim untuk mengikuti penataran dan pelatihan. Namun untuk pengiriman guru dalam upaya mengikuti studi lanjut belum dilaksanakan.

Tabel 7. Indikator Keberhasilan Standar Minimal Organisasi dan Manajemen

| No | Komponen | Indikator | Ketercapaian Minimal |
|----|------------|---|----------------------|
| 6 | Organisasi | 1 Struktur organisasi | Ada |
| | | 2 Personalia | Ada |
| | | 3 Uraian tugas | Ada |
| | | 4 Mekanisme kerja | Baik/lancar |
| 7 | Manajemen | 1 Pemahaman visi, misi sekolah | Baik |
| | | 2 Tingkat kehadiran guru | 90% |
| | | 3 Tingkat kehadiran tenaga administrasi | 90% |
| | | 4 Tingkat kehadiran tenaga lainnya | 90% |
| | | 5 Tingkat kehadiran siswa | 90% |
| | | 6 Tertib administrasi | Lengkap |
| | | 7 Kinerja sekolah | Baik |

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa secara umum administrasi organisasi dan manajemen pada sekolah ini telah cukup memadai.

8. Administrasi Peran Serta Masyarakat.

Hubungan sekolah dengan masyarakat masih sangat terbatas terutama hanya dengan orangtua. Hal itu pun dilakukan apabila siswa mengalami masalah dan masalah tersebut belum ditemukan jalan

pemecahannya atau belum selesai dalam waktu tiga hari.

Seharusnya hubungan antara sekolah dengan masyarakat terutama dengan orangtua tidak hanya dilakukan ketika siswa mengalami masalah akan tetapi hubungan tersebut dibina sebagai ajang sosialisasi terutama pihak sekolah dalam menginformasikan kemajuan-kemajuan belajar yang ditempuh oleh siswanya.

Tabel 8. Indikator Keberhasilan Standar Minimal Peran Serta Masyarakat

| No | Komponen | Indikator | Ketercapaian Minimal |
|----|----------------------|--|----------------------|
| 8. | Organisasi manajemen | 1 Dukungan badan peran serta masyarakat/komite sekolah/BP3 | Ada |
| | | 2 Perhatian orangtua | Ada |
| | | 3 Uraian tugas | Ada |
| | | 4 Peran tokoh masyarakat | Ada |
| | | 5 Peran serta dunia usaha | Ada |

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa secara umum administrasi peran serta pada sekolah ini telah cukup memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan administrasi kurikulum dan pengajaran cukup memadai dikatakan indikator keberhasilan standar pelayanan minimal telah mencakup ketersediaan kurikulum nasional dan lokal, keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal serta prosentase daya serap telah mencapai 75% lebih.
2. Pelaksanaan administrasi ketenagaan (personalia sekolah) terutama dari komponen guru dari segi kualitas belum memadai dikatakan indikator keberhasilan standar pelayanan minimal sebagaimana dipersyaratkan yakni prosentase guru berkualitas dan berkeahlian minimal 60% dari seluruh guru yang ada belum terpenuhi.
3. Pelaksanaan administrasi kesiswaan (peserta didik) cukup memadai dikatakan indikator keberhasilan standar pelayanan minimal telah mencakup meningkatnya angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka pendaftaran siswa dan menurunnya angka putus sekolah dan angka mengulang serta meningkatnya kelangsungan belajar siswa.
4. Pelaksanaan administrasi kurikulum dan pengajaran cukup memadai dikatakan indikator keberhasilan standar pelayanan minimal telah mencakup ketersediaan kurikulum nasional dan lokal, keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal serta prosentase daya serap telah mencapai 75% lebih.
5. Pelaksanaan administrasi sarana prasarana cukup memadai dikatakan indikator keberhasilan standar pelayanan minimal telah mencakup lahan yang cukup, ruangan dan perabot serta alat media pendidikan dan buku-buku yang menunjang proses belajar mengajar yang lengkap.
6. Pelaksanaan administrasi layanan khusus yang diberikan kepada siswa berupa layanan kesehatan yang dilaksanakan melalui program UKS telah cakup memadai sedangkan layanan khusus bimbingan konseling yang didalamnya tercakup layanan remedial dan program pengayaan belum optimal maka rasio perbandingan guru pembimbing dan siswa yakni 1 : 150 siswa belum terpenuhi.
7. Pelaksanaan administrasi organisasi dan manajemen cukup memadai maka dengan adanya stuktur organisasi, personalia, uraian tugas dan mekanisme kerja yang baik serta pemahaman visi dan misi yang baik dan tenaga kependidikan serta tingkat kehadiran seluruh ketenagaan sekolah telah mencapai 90 lebih.
8. Pelaksanaan administrasi peran serta masyarakat (humas) cukup memadai dikatakan indikator

keberhasilan standar pelayanan minimal telah mencakup adanya dukungan badan peran serta masyarakat, komite sekolah, BP3, perhatian orangtua dan peran serta tokoh masyarakat dapat tercapai.

B. Saran

1. Kepada kepala sekolah diharapkan untuk lebih melaksanakan tugas dan peranannya secara lebih baik dalam mengelola keseluruhan administrasi sekolah khususnya peningkatan kualitas dan kuantitas mutu ketenagaan (personil) sekolah terutama tenaga pendidik/guru sehingga memenuhi indikator keberhasilan standar pelayanan minimal penyelenggaraan sekolah.
2. Kepada seluruh pelaksana administrasi sekolah diharapkan untuk dapat lebih baik dalam meningkatkan ketercapaian keberhasilan standar pelayanan minimal penyelenggaraan sekolah dengan selalu meningkatkan wawasan, pengetahuan, nilai dan sikap dalam menjalankan tugas.
3. Kepada para guru diharapkan untuk lebih dapat membekali dirinya baik melalui pelatihan, penataran maupun melalui peningkatan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan sikap yang baik sehingga dapat secara profesional melaksanakan proses belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Dohau, Ibtisam, 2002, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Depdikbud, 1995, *Sekolah Plus*, Jakarta: Depdikbud RI
- Djojonegoro, Wardiman, 1993, *Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Sekolah Unggul*, Jakarta: Depdikbud RI
- Hamalik, Oemar, 2002, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Moedjiarto, 2002, *Sekolah Unggul Metodologi untuk Peningkatan Mutu Pendidikan*, Jakarta: Duta Graha Pustaka
- Prayitno dan Erman Amti, 1999, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta
- Rusyan, Tabrani, 1994, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sagala, Syaiful, 2002, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta
- _____, 2004, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, Jakarta: Nimas Multima
- Soetopo, Hendayat dan Wasty Soemanto, 1982, *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional
- Terry, G. R, 1977, *Dasar-Dasar Manajemen (Alih Bahasa G. A Ticoalu)* Jakarta: Bumi Aksara

